

LINGKAR YOGYA

"KEDAULATAN RAKAT
HALAM

MESKI HEMAT BIAYA Pilkada Serentak Rawan Konflik

YOGYA (KR) - Salah satu pertimbangan diselenggarakannya pilkada secara serentak adalah penghematan dana. Ongkos pilkada akan dapat dikendalikan dengan lebih baik oleh penyelenggara pemilu (KPU), jika pilkada dilakukan serentak. Namun demikian, pilkada serentak juga rawan memunculkan konflik.

Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY) Dr Zully Qodir mengatakan, pilkada langsung pasti memunculkan persaingan antar-kubu pasangan calon. Kecurangan sedikit saja akan dirispons oleh lawannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Konflik akan muncul manakala sengketa pilkada

tidak kunjung terselesaikan.

"Kalau kasusnya menumpuk tentu banyak orang yang marah," kata Zully dalam acara Diskusi Bulanan (*government session*) bertema 'Pilkada Serentak' di Aula KR, Jl Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, Rabu (11/2). Narasumber lain adalah Dosen MIP UMY Dr Dyah Mutiarin dan Pemimpin Redaksi KR Octo Lampito. Diskusi dihadiri puluhan mahasiswa MIP UMY.

Dyah mengatakan, untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas diperlukan proses uji publik dengan melibatkan masyarakat. Uji publik ini sangat penting untuk memberi gambaran secara gamblang tentang pemikiran dan pro-

gram yang ditawarkan oleh calon.

Selain itu partai politik juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar peduli dan mau terlibat dalam tiap tahapan pilkada. "Tanpa proses yang bersih, pilkada hanyalah menjadi ajang politik transaksional," katanya.

Octo mengatakan, untuk mewujudkan iklim demokrasi yang baik, peran media sangat penting dengan menyajikan pemerintahan yang berimbang. Media harus mampu keluar dari cengkeraman kapitalis untuk berpindah kepada kepentingan rakyat. "Kalau media tak berimbang dalam pemberitaan akan memunculkan distrust di tengah masyarakat," katanya.

(M-2)-k



Mahasiswa MIP UMY berfoto bersama usai diskusi.

KR-Franz Boedisoekar